

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PUNAN PEDALAMAN DI DESA PUNGIT KECAMATAN SEKATAK KABUPATEN BULUNGAN

**Imam Azhari¹, Drs. H. Burhanudin², M.Si, Dr. H. Muhammad Noor,
M.Si³**

Abstrak

Imam Azhari, Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahterann Masyarakat Punan Pedalaman di Desa Pungit Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dibawah bimbingan Bapak Drs.H. Burhanudin, M.Si dan Bapak Dr.H. Muhammad Noor, M.Si. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahterann Masyarakat Punan Pedalaman di Desa Pungit Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan melalui penyuluhan dan bimbingan sosial, bantuan sosial, rumah layak huni, pemberdayaan dan jaminan sosial serta untuk mengetahui Tanggapan (respons) Masyarakat Punan Pedalaman di Desa Pungit Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, arsip serta dokumen-dokumen. Sumber data diperoleh dari key informen dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program Dinas Sosial Kabupaten Bulungan ada beberapa program yang belum terlaksana dengan baik, seperti Pengadaan Rumah Layak Huni dan Jaminan Sosial serta Tanggapan (Respons) dari Masyarakat Jenis Punan Tugung yang lebih mendukung terhadap program Dinas Sosial dan tanggapan (Respons) dari Masyarakat Jenis Punan Rama yang memilh untuk tidak menghiraukan terhadap program Dinas Sosial Kabupaten Bulungan.

Kata Kunci : *Dinas, sosial, masyarakat, pedalaman.*

Pendahuluan

Punan adalah salah satu rumpun suku dayak yang terdapat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan kalimantan utara. Suku punan juga tersebar di Sabah dan Serawak, Malaysia Timur yang menjadi bagian dari Pulau Kalimantan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: mai.luna.1993@gmail.com

² Pembimbing I, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Pembimbing II, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Dari keseluruhan Suku Dayak, orang Punan inilah yang paling terbelakang khususnya Punan Pedalaman di Desa Pungit Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan baik budaya maupun kehidupan mereka. Secara umum mereka dapat dikategorikan primitif dengan melihat tempat tinggal mereka, yakni di hutan, anak-anak sungai dan lain sebagainya yang masih berada di dalam hutan. Keadaan hidup primitif ini membawa mereka selalu berpindah pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan terus menghindar atau mengasingkan diri dari kelompok manusia lainnya. Dalam kepercayaan mereka para leluhurlah yang menghendaki demikian. Masalah makanan bahan pokok seperti beras tak terlalu perlu bagi mereka. Makanan utama mereka adalah umbi dan umbut-umbutan hutan, ditambah dengan daging buruan yang mereka dapatkan. Suku dayak Punan pedalaman ini biasanya tinggal di Hutan Konservasi Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Suku Dayak Punan merupakan salah satu suku dayak asli di Kabupaten Bulungan, adapun suku dayak asli Kabupaten Bulungan adalah Tidung, Punan, Kenya dan Khayan. Suku Dayak Punan sebenarnya tidak sepenuhnya merupakan Dayak Punan Dalam, karena ada juga Dayak Punan luar yang sudah memanfaatkan teknologi yang baru seperti kompor dan lainnya. Selain itu Dayak Punan Luar sudah dapat menata hidup dengan menerima agama dan mengakui adanya pemerintahan dan hukum. Sedangkan Suku Dayak Punan pedalaman masih dalam tatanan kehidupannya masih hidup berpindah-pindah disepulur hutan Konservasi Kabupaten Bulungan dan sepenuhnya masih diatr oleh hukum adat. Suku Dayak Punan pedalaman sama sekali tidak mau menerima perubahan teknologi. Mereka bertahan hidup dengan menggunakan bahan makanan dari hutan seperti dari akar rotan, bambu muda dan sagu. Busana mereka juga belum menggunakan pakaian semestinya kehidupan penduduk saat ini. Mereka lebih terbuka hanya saja untuk hawatnya saja mereka tutup dengan bahan dari kulit kayu. Untuk menjaga kesehatan, suku dayak punan dalam memiliki kepercayaan sendiri. Karakteristik unik lain dari suku punan pedalaman di Kabupaten Bulungan adalah, bahwa suku punan pedalaman jika mendapati keluarganya bersin-bersin atau terlihat sakit maka akan diusir dari kelompok mereka karena dianggap Malapetaka. Mereka tidak menggunakan medis atau obat-obatan untuk menyembuhkan sehingga mereka hidup hanyalah berdasarkan dari "seleksi alam". Untuk melanjutkan kehidupan. Setelah menikah anak perempuan tersebut mengikuti keluarga laki-laki. Selain itu akses yang sulit untuk menjangkau mereka memperparah untuk dapat menemui Suku Dayak Punan ini. Sehingga untuk intervensi kesehatan , edukasi kesehatan, pendidikan dan lainnya menjadi sulit. Itulah yang menyebabkan semakin tertinggalnya Suku Dayak Punan Dalam.

Dari segi aktivitas ekonomi kehidupan dan kerja mereka sehari-hari berdasarkan limpahan kasih dari alam. Memang mereka bisa juga berhubungan dagang dengan masyarakat umum, tetapi tidak ditukar dengan uang melainkan dilakukan secara barter (pertukaran). yang bahan barter mereka adalah rotan, damar, kayu gaharu, sarang wallet yang akan dibarter dengan gula, tembakau dan

kain-kainan. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa ketertinggalan masyarakat punan sangat memprihatinkan. Dari ketertinggalan masyarakat punan pedalaman di Desa Pungit, disinilah peran dari Dinas Sosial Kabupaten Bulungan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat punan pedalaman ketingkat yang lebih baik. Dengan demikian, peran Dinas Sosial Kabupaten Bulungan menjadi peran vital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat punan pedalaman. Upaya nyata yang telah dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bulungan lakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat punan pedalaman, seperti pemberian pelatihan dalam bercocok tanam, pemberian fasilitas rumah sederhana atau pengadaan pemukiman lokal agar bisa lebih mudah untuk dijangkau, pemberian bantuan sosial seperti bahan pangan, pembinaan, peningkatan derajat kesehatan, pemberdayaan, dan pelatihan keterampilan.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Menurut Friedman M dalam *Economic Freedom, Human Freedom, Political Freedom* (1992), peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu atau kelompok harus dilakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain yang menyangkut peran-peran tersebut.

Menurut Soekanto dalam bukunya *Perbandingan Hukum* (1990) Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran

Kesejahteraan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2001), kata kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan [sehat](#) dan [damai](#).

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dalam *Sistem Sosial Indonesia* (1993) dapat dirumuskan dari 4 (empat) indikator yaitu :

1. Rasa aman (*security*),
2. Kesejahteraan (*welfare*),
3. Kebebasan (*freedom*)
4. Jati Diri (*Identity*)

Todaro dalam *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke Tiga* (2003) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.

Masyarakat Tradisional / Pedalaman

Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya metode penelitian masyarakat (1997), masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu Interaksi antar warga-warganya, Adat istiadat, Kontinuitas waktu, Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.

Menurut Emile Durkheim dalam Aturan-Aturan Metode Sosiologis (1985), bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah:

- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Menurut Friedlander dalam *The Years Of Extermination* (2006), kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Pitirim A. Sorokin dalam bukunya *Social Cultural and Dynamics* (1941) berpandangan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus tiga sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Siklus tiga sistem kebudayaan ini adalah :

- a. Kebudayaan ideasional
- b. Kebudayaan ideasional, yaitu kebudayaan yang didasari oleh nilai-nilai dan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural.
- c. Kebudayaan Idealistis
- d. Kebudayaan idealistis, yaitu kebudayaan di mana kepercayaan terhadap unsur adikodrati (supranatural) dan rasionalitas yang berdasarkan fakta bergabung dalam menciptakan masyarakat ideal.
- e. Kebudayaan Sensasi
- f. Kebudayaan sensasi, yaitu kebudayaan di mana sensasi merupakan tolak ukur dari kenyataan dan tujuan hidup masyarakat.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional dari penelitian ini adalah tentang Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Punan Pedalaman di Desa Pungit Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dengan tujuan untuk mencapai tingkat

kesejahteraan bagi masyarakat Punan Pedalaman melalui penyuluhan, bantuan sosial, Rumah Layak Huni, pemberdayaan dan pelayanan kesehatan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. penelitian Deskriptif Kualitatif merupakan penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala yang dikumpulkan dilapangan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Fokus Penelitian

Dari paparan di atas, maka penulis dalam melaksanakan penelitian merujuk pada permasalahan yang di anggap perlu diteliti adalah :

1. Peran Dinas Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Punan Pedalaman di Desa Pungit Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan melalui :
 - a. Penyuluhan dan bimbingan sosial
 - b. Bantuan sosial
 - c. Rumah Layak Huni
 - d. Pemberdayaan
 - e. Jaminan Pelayanan kesehatan
2. Tanggapan (*respons*) Masyarakat Punan Pedalaman terhadap Peran Dinas Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Punan Pedalaman di Desa Pungit Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan.

Hasil Penelitian

Penulis akan menguraikan hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. Yang menjadi Fokus penelitian adalah : Peran Dinas Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Punan Pedalaman di Desa Pungit Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan melalui :

1. Penyuluhan Dan Bimbingan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian tentang penyuluhan dan bimbingan sosial, pada tahun 2008 dinas sosial kabupaten bulungan telah melaksanakan beberapa program di desa pungit, seperti :

- a. Pelatihan Dengan PKK,
- b. Cara Pemenuhan Kebutuhan Bahan Pangan
- c. Pelatihan Tata Rias
- d. Pembuatan kreatifitas

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil perbandingan dengan teori atau pendapat ahli Abu Ahmadi dalam Psikologi (1991) yang menjadi landasan/dasar penulis dalam perbandingan, maka dapat disimpulkan bahwa, program dinas

sosial kabupaten bulungan dibidang penyuluhan dan bimbingan sosial sudah tepat dan berjalan dengan baik.

2. Bantuan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2008 Dinas Sosial kabupaten bulungan telah melaksanakan program bantuan sosial di desa pungit kecamatan sekatak. Dalam program bantuan sosial tersebut, dinas sosial kabupaten bulungan telah melaksanakan bantuan sosial melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, berupa beras dan sembako dengan jangka waktu pemenuhan selama satu tahun dan tentunya penerima harus sesuai dengan kriteria, seperti masyarakat yang kurang mampu. terutama lansia yang sudah tidak mampu untuk bekerja. Dengan hasil penelitian tersebut, Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan dasar perbandingan penulis dengan hasil penelitian dibidang bantuan sosial.

Dalam hasil perbandingan hasil penelitian dibidang bantuan sosial dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka penulis menyimpulkan bahwa program tersebut telah sesuai dengan urutan yang berkaitan. Hal ini bisa dilihat dari Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa jenis bantuan juga ada yang bersifat bantuan langsung dan bantuan secara bertahap serta jenis bantuan seperti bantuan dalam bentuk bahan sandang, pangan dan papan.

3. Rumah Layak Huni

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kepala bidang di dinas sosial kabupaten bulungan yang menangani pengadaan rumah layak huni di desa pungit kecamatan sekatak, dinas sosial kabupaten bulungan telah mengadakan/membangun 2 (dua) unit rumah layak huni.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada rumah layak huni yang telah dibangun dinas sosial kabupaten bulungan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa rumah layak huni yang telah dibangun/diadakan dinas sosial kabupaten bulungan belum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan Menteri Negara perumahan rakyat republik indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menjadi landasan penulis dan mengatakan bahwa rumah layak huni harus berada dilingkungan yang sehat dan terjangkau. Berdasarkan hasil pengamatan langsung ke lokasi, keadaan rumah layak huni tersebut tidak memenuhi kedua kriteria tersebut. Karena daerah pembangunan rumah layak huni yang sangat kotor dan berdebu dan jarak tempuh yang jauh.

4. Pemberdayaan

Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu Staf Seksi KAT dan Kepahlawanan di Dinas Sosial Kabupaten Bulungan, program pemberdayaan

yang telah dilaksanakan dinas sosial kabupaten bulungan pada tahun 2011 di Desa Pungit, seperti :

- a. Pengadaan Bengkel,
- b. Menjahit,
- c. Service Alat Elektronik,
- d. Mabel

Dalam hasil penelitian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa program pemberdayaan dinas sosial kabupaten bulungan program pemberdayaan yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bulungan, telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Karena dalam program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh dinas sosial, dapat dilihat bahwa program tersebut tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedalaman serta dalam tahap dan jangka waktu yang sesuai dengan apa yang telah diatur. Tetapi masalah yang didapat dari hasil wawancara dengan informan di Dinas Sosial Kabupaten Bulungan, tidak adanya keseriusan dari masyarakat setempat dalam menjaga atau menjalankan apa yang telah didirikan atau diadakan Dinas Sosial Kabupaten Bulungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan dari Dinas Sosial Kabupaten Bulungan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, hanya saja dalam program pemberdayaan, objek dari program atau masyarakat dari Desa Pungit yang tidak menjalankan dan menjaga apa yang telah diadakan/didirikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulungan agar dapat berkelanjutan.

5. Jaminan Pelayanan kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian dalam program jaminan pelayanan kesehatan, maka program jaminan pelayanan kesehatan dari Dinas Sosial Kabupaten Bulungan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah, telah sesuai dengan ketentuan dan tujuannya sesuai dengan landasan penulis, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial. Masalah yang ditemukan masyarakat pedalaman di desa pungit adalah masalah prosedur dalam mendapatkan pelayanan. Menurut penulis, kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat pedalaman hanya masalah sulitnya melengkapi syarat dalam proses administrasi dan kurangnya pemahaman prosedur untuk mendapatkan pelayanan. Selain itu, sesuai dengan isi tabel inidikator standar pelayanan minimal bidang sosial daerah Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial, bagi penyandang cacat fisik dan mental serta usia lanjut yang tidak potensial, akan diberikan rujukan dan himbauan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi masyarakat pedalaman di desa pungit lebih memilih merawat sendiri untuk kategori masalah penyandang cacat fisik dan mental serta usia lanjut yang tidak potensial. Tentunya dalam

program ini tidak ada unsur pemaksaan dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.

Tanggapan (*respons*) Masyarakat Punan Pedalaman

sebelumnya perlu penulis jelaskan bahwa hasil tinjauan langsung ke lokasi penelitian, masyarakat punan pedalaman di desa pungit terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu jenis punan tugung dan jenis punan rama.

Tanggapan (*respons*) Masyarakat Punan Tugung

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan dari masyarakat jenis punan tugung, maka dapat diketahui bahwa masyarakat punan tugung sangat mendukung dan mengharapkan bantuan dari dinas sosial kabupaten bulungan. tetapi masalah yang dihadapi adalah, tidak adanya pembagian yang merata dari Desa Pungit terhadap bantuan-bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Bulungan serta tidak adanya ajakan dari desa untuk melibatkan masyarakat punan tugung di kawasan RT. III desa pungit terhadap program-program dari dinas sosial kabupaten bulungan. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggapan (*respons*) masyarakat punan jenis punan tugung terhadap program dinas sosial kabupaten dapat ditanggap dengan baik oleh masyarakat punan tugung.

Tanggapan (*respons*) Masyarakat Punan Rama

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat jenis punan rama, penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat punan rama lebih memilih hidup di hutan sampai saat ini dengan memegang erat kebiasaan nenek moyang mereka serta lebih percaya terhadap sesuatu yang bersifat tradisional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanggapan (*respons*) masyarakat punan jenis punan rama lebih tidak menghiraukan program dari dinas sosial kabupaten bulungan dan lebih mempercayai apa yang mereka percaya atau yakini sampai saat ini.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan mengenai peran dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat punan pedalaman di desa pungit kecamatan sekatak kabupaten bulungan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Peran dinas sosial kabupaten bulungan

Peran dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat punan pedalaman di desa pungit kecamatan sekatak kabupaten bulungan menjadi kunci utama dalam pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat punan pedalaman melalui Penyuluhan dan bimibingan sosial,

Bantuan sosial, Rumah Layak Huni, Pemberdayaan, dan Jaminan Pelayanan kesehatan. Selain itu, peran dinas sosial dalam usaha-usaha dalam mensejahterakan masyarakat punan pedalaman terutama dalam meningkatkan taraf hidup untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat yang sebaik-baiknya, menyeluruh dan merata sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan ketentuan dan asas-asas yang tepat.

2. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial

Program Dinas Sosial Kabupaten Bulungan di bidang penyuluhan dan bimbingan sosial telah terlaksana dengan baik. Program tersebut dilaksanakan melalui Pelatihan Dengan PKK, Cara Pemenuhan Kebutuhan Bahan Pangan, Pelatihan Tata Rias dan Pembuatan kreatifitas. Program tersebut telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pedalaman itu sendiri. Karena dilihat dari tujuan penyuluhan dan bimbingan sosial itu sendiri adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya pada masyarakat pedalaman di Desa Pungit Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan.

3. Bantuan Sosial

Program bantuan sosial yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulungan adalah program yang cara pemenuhan kebutuhan pada masyarakat Punan Pedalaman di Desa Pungit dilakukan dengan cara berkala atau bertahap dengan jangka waktu pemenuhan selama 1 (satu) tahun. Dalam pelaksanaannya, program bantuan sosial ini dilakukan melalui program Bantuan langsung, Penyediaan aksesibilitas dan Penguatan kelembagaan. Selain itu program dinas Dinas Sosial Kabupaten Bulungan yang dilakukan melalui program bantuan sosial, telah sesuai dengan peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Serta program bantuan sosial ini diberikan kepada anggota atau kelompok masyarakat seperti Individu, keluarga atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam.

4. Rumah Layak Huni

Pembangunan Rumah Layak huni di Desa Pungit merupakan salah satu solusi dari Dinas Sosial Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedalaman yang ada. Tetapi, dalam keadaan nyata (real) dari bangunan rumah layak huni tersebut masih tidak sesuai dengan peraturan Menteri Negara perumahan rakyat republik indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dalam kiteria rumah layak huni seperti Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, sanitasi dan Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m²/orang sampai dengan 12 m²/orang.

5. Pemberdayaan

Program pemeberdayaan dari dinas sosial kabupaten bulungan khususnya program pemberdayaan pada komunitas adat terpencil (KAT) merupakan salah satu program dari dinas sosial kabupaten bulungan yang telah terlaksana

dengan baik melalui program Pengadaan Bengkel, Menjahit, Service Alat Elektronik dan Mabel. Karena dari program perberdayaan itu sendiri, dinas sosial kabupaten bulungan memiliki beberapa tujuan, yaitu Memenuhi kebutuhan sosial dasar warga KAT meliputi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur sederhana, pendidikan, seni budaya dan Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga KAT melalui proses pembelajaran sosial dengan menghormati inisiatif dan kreatifitas warga dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasarnya sehingga warga KAT dapat mengaktualisasi diri dalam lingkungannya secara wajar, baik jasmani, rohani, dan sosial untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan.

6. Jaminan pelayanan kesehatan

Jaminan pelayanan kesehatan merupakan salah satu program yang diharapkan oleh masyarakat di desa pungit dan dalam pelaksanaannya, dinas sosial kabupaten bulungan memberikan pelayanan yang mudah dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar melalui program ASKESES. Dalam program tersebut, fasilitas yang diberikan oleh dinas sosial kabupaten bulungan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya, bidan praktik mandiri, dokter swasta, rumah bersalin swasta, dan klinik bersalin swasta. Tetapi, kendala yang dihadapi melainkan dari masyarakat desa pungit itu sendiri. Karena ketidakmengertian dari masyarakat tersebut yang membuat sulitnya masyarakat desa pungit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Contohnya, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masyarakat desa pungit harus melakukan registrasi atau harus menunjukkan surat rekomendasi. Hal seperti itu yang menjadi kendala dari masyarakat di Desa Pungit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

7. Tanggapan (*respons*) masyarakat punan pedalaman

Dalam menggapi atau berpartisipasi dalam semua program dari Dinas Sosial Kabupaten Bulungan, masyarakat punan pedalaman memiliki tanggapan yang berbeda. Seperti tanggapan dari jenis punan tugung yang lebih mengharapakan bantuan dari dinas sosial kabupaten bulungan. Bertolak belakang dengan masyarakat jenis punan rama yang lebih tidak menghiraukan bantuan dari dinas sosial kabupaten bulungan.

Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang didapati penulis saat penelitian, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut, yaitu :

1. Peran dinas sosial kabupaten bulungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan pilar utama dalam membatu masyarakat terutama masyarakat tertinggal/pedalaman. Telah kita ketahui bahwa, adanya bantuan dari dinas sosial kabupaten tergantung adanya permintaan dari desa atau kecamatan setempat. Menurut penulis, hal tersebut merupakan sesuatu kesulitan desa setempat yang tidak semua dari masyarakat atau civitas desa yang mengetahui prosedur dalam melakukan permintaan bantuan ke dinas

sosial kabupaten bulungan. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, banyak dari permintaan masyarakat punan pedalaman di desa pungit kecamatan sekatak telah menyampaikan pemerintah desa setempat agar permintaan masyarakat punan setempat disampaikan ke dinas terkait atau dinas sosial. Tetapi permintaan dari masyarakat punan sendiri tidak dihiraukan oleh pemerintahan desa setempat. Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan langsung dan bertanya langsung apa yang dibutuhkan masyarakat terutama masyarakat tertinggal/pedalaman agar program yang direncanakan dan dilaksanakan tepat sasaran

2. Dalam pelaksanaan program dinas sosial, khususnya pada program pengadaan rumah layak huni, dinas sosial harus lebih memperhatikan keadaan bangunan (rumah). Karena, dalam kenyataannya, rumah layak huni yang dibangun belum/tidak sesuai dengan standar rumah layak huni. Oleh karena itu, dinas sosial kabupaten bulungan harus bisa langsung terjun ke lapangan untuk memantau proses pembangunan. Dalam proses pembangunannya. Serta dinas sosial kabupaten bulungan harus langsung mengawasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam peraturan Menteri Negara perumahan rakyat republik indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yaitu Dinas Sosial melakukan langkah-langkah kegiatan, seperti Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk rumah layak huni melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan, Melakukan pemuktahiran data rumah secara berkala dan Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni.
3. Dalam pelaksanaan program dari dinas sosial harus lebih sering melakukan tinjauan ke masyarakat pedalaman/tertinggal. Karena, tinjauan langsung dari dinas sosial kabupaten bulungan merupakan salah satu cara untuk melihat langsung fakta dan keadaan masyarakat pedalaman/tertinggal. Dengan demikian, dinas sosial bisa lebih mudah dalam menciptakan strategi yang tepat dalam pelaksanaan program-program yang tepat. Selain itu, segala jenis bantuan dari dinas sosial ke desa-desa terpencil, harus dicek atau diperiksa secara berkala. Karena, sesuai dengan kejadian yang didapat peneliti bahwa suatu pengadaan dari dinas sosial kabupaten bulungan ke desa-desa terpencil harus ada pengawasan (controle) langsung dari dinas sosial kabupaten bulungan
4. Telah kita kita ketahui bahwa, dalam pelaksanaan program pelayanan jaminan kesehatan, kesulitan masyarakat khususnya masyarakat pedalaman di Desa Pungit yaitu sulitnya dalam memenuhi syarat administrasi dalam mendapatkan pelayanan tersebut. Oleh karna itu, dinas sosial kabupaten bulungan harus memiliki strategi khusus. Seperti jasa pendamping bagi setiap masyarakat pedalaman yang mengalami kesulitan,. Sehingga program pelayanan jaminan

kesehatan ini bisa berjalan dengan baik dan merata bagi setiap masyarakat, khususnya pada masyarakat punan pedalaman di Desa Pungit Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan.

5. Tanggapan dari masyarakat punan pedalaman/tertinggal yang tidak menanggapi segala bantuan dinas sosial kabupaten bulungan hanya karena belum paham atau mengertinya masyarakat punan pedalaman (punan rama) yang sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Oleh karena itu, strategi dan pendekatan merupakan kunci utama dalam menghadapi masyarakat punan pedalaman yang menolak budaya luar. Jelas bahwa pendekatan dan tinjauan langsung dari dinas sosial kabupaten bulungan merupakan cara yang tepat untuk menciptakan strategi yang tepat dan dapat diterima oleh masyarakat punan pedalaman khususnya pada masyarakat punan rama di desa pungit kecamatan sekatak kabupaten bulungan.

Daftar Pustaka

A.Sorokin, Pitrim, 1971. *Social Cultural And Dynamics*, The Macmilan Company, New York.

Ahmadi, Abu 1991. *Psikologi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Emile Durkheim 1985. *Aturan-Aturan Metode Sosiologis*. Open University Press, New York.

Friedman M 1992. *Economic Freedom, Human Freedom, Political Freedom*. Seventh Series Npht : Open University Press.

Koentjaraningrat 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Lander, Fried, 2006. *The Years Of Extermination*, Harper Perennial, Jakarta.

Nasikun, 1993. *Sistem Sosial Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, 1990. *Perbandingan Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Todaro, 1989. *Pembangunan Ekonomi Ke Tiga*, Erlangga, Jakarta.

Dokumen-Dokumen :

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial.